



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol.4 No.4 (2025) pp: 1689-1695

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kemandirian Fiskal Dan Strategi Dalam Peningkatan PAD

Denisha Rerung¹, Olivya Vivien Lili Palamba², Riani Sandi Parangki³, Petrus Peleng Roreng⁴, Afian Dezi Sanda Sipi⁵
^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus

deninsharung@gmail.com

Abstrak

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada dana pusat. Kabupaten Toraja Utara hingga kini masih berada pada tingkat kemandirian fiskal yang sangat rendah, ditandai dengan dominannya transfer dari pemerintah pusat dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemandirian fiskal serta merumuskan strategi yang relevan untuk meningkatkan PAD secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumentasi pada BAPENDA serta Kantor Keuangan Kabupaten Toraja Utara. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian fiskal dipengaruhi oleh terbatasnya basis ekonomi daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan pendapatan, serta belum optimalnya pendataan dan pemanfaatan aset daerah. Selain itu, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal serta minimnya inovasi kebijakan turut menghambat peningkatan PAD. Strategi peningkatan yang direkomendasikan meliputi optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi layanan, penguatan sistem administrasi pendapatan, pemanfaatan aset daerah secara produktif, pengembangan sumber PAD baru berbasis potensi pariwisata dan ekonomi lokal, serta peningkatan efisiensi belanja publik. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kemandirian fiskal membutuhkan integrasi antara inovasi kebijakan, penguatan kapasitas institusional, dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi, Strategi PAD, Toraja Utara

Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen utama dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal dan menyediakan layanan publik secara mandiri. Keberhasilan desentralisasi salah satunya diukur melalui tingkat kemandirian fiskal, yaitu kemampuan daerah membiayai pengeluaran pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan tinggi terhadap transfer pemerintah pusat (Mardiasmo, 2019). Namun, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal masih menjadi tantangan umum di sebagian besar daerah, terutama daerah pemekaran dengan struktur ekonomi terbatas (Digidowiseiso, 2023; Pratama & Indrawati, 2022).

Fenomena tersebut tampak jelas pada Kabupaten Toraja Utara. Meskipun memiliki potensi ekonomi berupa pariwisata budaya, jasa, perdagangan lokal, serta aset daerah yang dapat dimonetisasi, kontribusi PAD masih berada pada kategori sangat rendah. Berdasarkan dokumen keuangan daerah dan hasil observasi lapangan, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Toraja Utara selama periode 2021–2023 hanya berkisar sekitar lima persen, dengan komposisi pendapatan yang sangat didominasi oleh transfer pusat. Hal ini tercermin dari hasil analisis keuangan yang menunjukkan bahwa PAD belum mampu menopang kebutuhan fiskal daerah secara memadai.

Rendahnya capaian PAD ini tidak hanya menunjukkan lemahnya basis ekonomi daerah, tetapi juga mengindikasikan adanya kendala kelembagaan seperti efektivitas pemungutan pajak, pendataan wajib pajak, integrasi data fiskal, serta pengelolaan aset yang belum optimal.

Temuan tersebut sejalan dengan literatur mengenai tantangan fiskal daerah di Indonesia. Penelitian Rahman dan Setyawan (2023) menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian keuangan daerah umumnya dipengaruhi oleh lemahnya struktur ekonomi lokal, minimnya inovasi pendapatan daerah, serta ketergantungan psikologis birokrasi pada Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, studi Anggraeni dan Putra (2024) menegaskan pentingnya

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kemandirian Fiskal Dan Strategi Dalam Peningkatan PAD

digitalisasi sistem perpajakan daerah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan, terutama pada daerah dengan tingkat informalitas ekonomi yang tinggi. Kondisi serupa juga ditemukan dalam wawancara penelitian ini, di mana keterbatasan teknologi menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Selain itu, aspek kelembagaan dan tata kelola keuangan daerah turut menjadi penentu kemandirian fiskal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala BAPENDA dan pejabat pengelola aset daerah Toraja Utara, ditemukan bahwa pendataan aset belum sepenuhnya mutakhir, integrasi data fiskal masih terbatas, dan pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD belum optimal

Hal ini sejalan dengan temuan Febrianti dan Dharma (2024), yang menyatakan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan terutama dalam koordinasi antar-OPD dan perencanaan fiskal jangka panjang sering menjadi hambatan utama peningkatan pendapatan daerah.

Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi ekonomi Kabupaten Toraja Utara dan realisasi PAD yang masih sangat rendah. Tanpa strategi fiskal yang terintegrasi mulai dari penguatan kelembagaan, pemutakhiran data pajak dan aset, digitalisasi pemungutan, hingga pengembangan sumber pendapatan baru berbasis potensi local maka tingkat ketergantungan fiskal daerah dipastikan akan terus berlanjut. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris penting dalam merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemandirian fiskal di Kabupaten Toraja Utara?
2. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat?

Tinjauan Teori

Kerangka teori dalam penelitian mengenai kemandirian fiskal daerah dibangun atas dasar tiga fondasi utama: Teori Desentralisasi Fiskal, *Resource-Based View (RBV)*, dan *Agency Theory*.

Teori Desentralisasi Fiskal (Oates, 2019) menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah memungkinkan meningkatnya efisiensi pelayanan publik serta optimalisasi potensi lokal. Dalam konteks Indonesia, besarnya kontribusi PAD dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan (Lewis, 2020). Dengan demikian, kemandirian fiskal merupakan indikator yang merefleksikan efektivitas pelaksanaan desentralisasi.

Sementara itu, *Resource-Based View* (Barney, 1991; dikembangkan dalam studi Santoso & Maharani, 2023) memandang bahwa pemerintah daerah memiliki *resources* unik berupa aset daerah, potensi ekonomi, pariwisata, BUMD, dan kapasitas SDM. Pemerintah daerah yang mampu mengelola sumber daya tersebut secara strategis akan memperoleh *competitive advantage* berupa peningkatan PAD secara berkelanjutan. Dalam penelitian fiskal daerah, RBV menjelaskan mengapa beberapa pemerintah daerah mampu mandiri secara fiskal sementara yang lain tetap bergantung pada dana pusat.

Agency Theory digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Ketergantungan pada transfer pusat dapat menciptakan moral hazard dan mengurangi insentif daerah untuk memaksimalkan PAD. Oleh karena itu, kualitas tata kelola, integritas birokrasi, dan akuntabilitas publik menjadi bagian penting dalam kemampuan daerah meningkatkan pendapatannya (Prabowo & Cooper, 2021).

Integrasi ketiga teori ini menegaskan bahwa kemandirian fiskal bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kelembagaan, strategi pemanfaatan aset, kapasitas aparatur, dan desain kebijakan fiskal daerah.

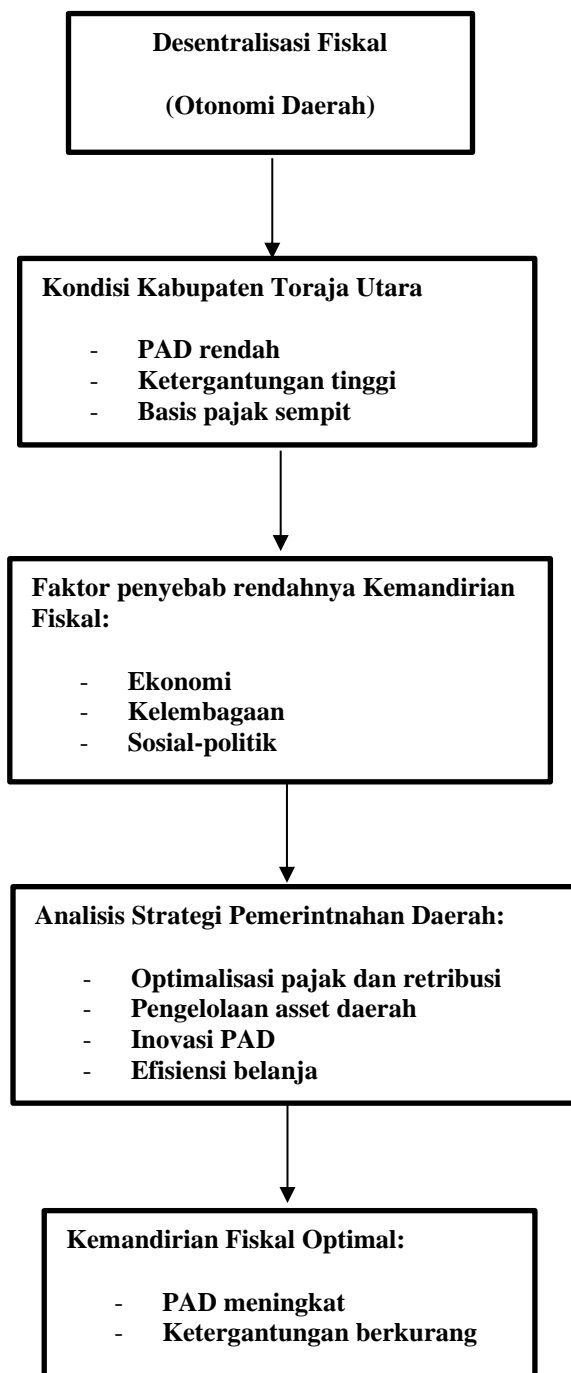
Model Konseptual Penelitian

Model konseptual penelitian ini disusun berdasarkan keterkaitan teoritis dan temuan empiris terbaru, yang menunjukkan bahwa:

1. Digitalisasi pajak daerah (e-payment, e-billing, QRIS) meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pemungutan (Utami & Nugroho, 2022; Setyawan & Siregar, 2024).

2. Pengelolaan aset daerah dan BUMD memberi kontribusi signifikan terhadap PAD jika dikelola profesional (Darma & Aimon, 2021; Santoso & Maharani, 2023).
3. Struktur ekonomi daerah memengaruhi luasnya basis pajak (Kuncoro & Sari, 2020; Aminah & Kusuma, 2021).
4. Kualitas tata kelola menentukan kemampuan daerah memobilisasi pendapatan (Prabowo & Cooper, 2021; Rahmawati & Setiawan, 2022).

Dengan demikian, model konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Konsepsi pribadi penulis, 2025

Dalam model ini, digitalisasi dan tata kelola berfungsi sebagai penggerak utama (*drivers*), sedangkan pengelolaan aset dan struktur ekonomi merupakan penentu basis pendapatan. Output akhirnya adalah peningkatan kemandirian fiskal, yang diekspresikan melalui peningkatan PAD dan penurunan ketergantungan terhadap dana transfer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kemandirian fiskal serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Toraja Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial secara kontekstual dan mendalam, terutama ketika peneliti ingin menggali pengalaman praktis, persepsi, serta proses pengambilan kebijakan pada lembaga pemerintah daerah (Creswell & Poth, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti tidak menguji hipotesis seperti pada desain kuantitatif, tetapi memaknai temuan lapangan sebagaimana dialami langsung oleh para pelaku kebijakan (Yin, 2018). Desain penelitian ini mendukung tujuan untuk memadukan teori desentralisasi fiskal, tata kelola, dan manajemen aset dengan kondisi empiris yang ada di pemerintah daerah.

Populasi penelitian mencakup aktor-aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terlibat dalam pemungutan PAD dan pengelolaan aset daerah. Namun, karena penelitian kualitatif tidak menekankan representativitas numerik, penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki wawasan, otoritas, dan pengalaman yang relevan (Palinkas et al., 2015). Dalam konteks skripsi ini, informan yang diwawancarai hanya berjumlah 2 orang, yaitu **Bapak Drs. Paris Salu, SH., M.Si. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Bapak Simon selaku Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Perencanaan Aset Daerah**. Keduanya dipilih karena memiliki posisi strategis dalam proses pengelolaan PAD serta pendataan dan pemanfaatan aset daerah sehingga mampu memberikan data yang kaya dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Sub Bidang Pengadaan serta Perencanaan Aset Daerah. Lokasi ini dipilih secara sengaja karena merupakan pusat administrasi yang menangani pemungutan PAD serta pencatatan dan pemanfaatan aset daerah yang terkait langsung dengan isu kemandirian fiskal. Penelitian dilaksanakan selama bulan september hingga oktober 2025, yang memberikan waktu cukup bagi peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Periode waktu tersebut juga memungkinkan dilakukannya triangulasi informasi dan pengecekan ulang data sehingga meningkatkan kredibilitas dan konsistensi temuan (Maxwell, 2013).

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan kedua informan kunci. Teknik ini memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan tetapi tetap fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul selama wawancara (Kallio et al., 2016). Pertanyaan wawancara berfokus pada kondisi PAD, mekanisme pemungutan pajak, pemanfaatan aset, hambatan kelembagaan, serta strategi yang sedang atau dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain wawancara, peneliti juga melakukan analisis dokumen, termasuk laporan realisasi PAD, laporan pengelolaan aset, regulasi daerah, serta dokumen perencanaan strategis yang relevan. Teknik observasi langsung turut dilakukan untuk melihat bagaimana proses administrasi berjalan dalam praktik sehari-hari, khususnya terkait alur pemungutan pajak dan pendataan aset daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen. Tahapan analisis dilakukan mulai dari transkripsi data, pengkodean awal, penyusunan tema, verifikasi tema, hingga penyusunan interpretasi akhir (Braun & Clarke, 2019). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari wawancara dengan dokumen resmi dan hasil observasi; serta member checking, yaitu mengonfirmasi ringkasan hasil wawancara kepada informan guna memastikan tidak terjadi salah tafsir. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi teori dengan membandingkan temuan lapangan dengan konsep desentralisasi fiskal, teori kelembagaan, dan teori pengelolaan aset, sehingga hasil analisis lebih kuat secara akademik.

Hasil dan Diskusi

Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 2 informan kunci yang memiliki otoritas langsung dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan aset daerah Kabupaten Toraja Utara. Informan pertama adalah Drs. Paris Salu, SH., M.Si, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), yang telah menjabat lebih dari lima tahun dan memiliki pengalaman panjang di bidang pengelolaan pajak daerah, administrasi fiskal, dan tata kelola pendapatan daerah. Informan ini berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan pemungutan PAD, pengawasan kegiatan pemungutan, serta penyusunan strategi peningkatan penerimaan daerah.

Informan kedua adalah Bapak Simon, selaku Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Perencanaan Aset, yang memiliki pengalaman lebih dari enam tahun dalam pendataan aset, perencanaan pemanfaatan aset, serta penyusunan dokumen neraca aset daerah. Beliau adalah pejabat teknis yang memahami secara langsung kondisi faktual keberadaan aset-aset daerah, termasuk aset yang berpotensi maupun yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua informan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan di bidang administrasi publik dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga informasi yang diberikan bersifat kredibel dan mencerminkan kondisi empiris pada instansi yang mereka pimpin. Kombinasi pengalaman strategis (Kepala BAPENDA) dan teknis-operasional (Kepala Sub Bidang Aset) memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh terkait permasalahan kemandirian fiskal Kabupaten Toraja Utara.

2. Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kabupaten Toraja Utara masih berada pada tingkat kemandirian fiskal yang rendah karena PAD belum mampu menopang kebutuhan belanja daerah. Kepala BAPENDA menegaskan bahwa ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) masih sangat tinggi. Beliau menyatakan:

“PAD kita masih jauh dari cukup. Proporsinya kecil sekali dibanding belanja daerah, jadi kita tetap sangat bergantung pada transfer pusat.”

Pernyataan ini selaras dengan data pendapatan daerah yang menunjukkan dominasi pendapatan transfer dibandingkan PAD, sehingga menjelaskan fokus utama penelitian mengenai penyebab rendahnya kemandirian fiskal.

3. Faktor Penyebab Rendahnya PAD

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa rendahnya PAD disebabkan oleh kombinasi persoalan ekonomi lokal, kendala administrasi pemungutan, dan pemanfaatan aset yang belum maksimal. Kepala BAPENDA mengungkapkan bahwa basis pajak daerah masih terbatas karena struktur ekonomi lokal didominasi sektor mikro dan informal, yang membuat potensi pajak relatif kecil. Ia menjelaskan:

“Kegiatan usaha kita banyak yang kecil. Hotel dan restoran besar hanya beberapa. Jadi basis pajaknya memang sempit.”

Selain itu, pendataan wajib pajak belum sepenuhnya mutakhir. Proses pengawasan juga belum optimal karena keterbatasan SDM. Beliau menambahkan:

“Masih ada wajib pajak yang belum terdaftar atau belum melapor secara rutin. Petugas kami juga terbatas kalau harus turun mengawasi semuanya.”

Sementara itu, dari sisi aset daerah, Kepala Sub Bidang Aset menegaskan bahwa banyak aset yang belum dapat dimanfaatkan untuk mendukung PAD karena belum melalui proses penilaian, legalitas pemanfaatan, atau verifikasi status lahan. Beliau menyampaikan:

“Aset kita memang ada, tetapi tidak semuanya bisa langsung dimanfaatkan. Ada yang masih menunggu legalisasi, ada juga yang perlu perencanaan teknis.”

Hal ini menunjukkan bahwa aset daerah memiliki potensi, namun belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PAD.

4. Digitalisasi Pemungutan Pajak

Digitalisasi pemungutan pajak, seperti penggunaan pembayaran elektronik dan QRIS, telah mulai diterapkan, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Informan I menyebut bahwa tidak semua wajib

pajak siap menggunakan metode pembayaran digital dan infrastruktur jaringan belum mendukung secara merata. Menurutnya:

“Digitalisasi ini baik, tetapi belum semua siap. Ada wajib pajak yang masih pilih manual, dan kadang jaringan juga menghambat.”

Dengan demikian, digitalisasi belum memberikan peningkatan penerimaan yang signifikan, meskipun potensinya cukup besar untuk jangka panjang.

5. Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan II, aset daerah sebenarnya memiliki peluang untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, pemanfaatannya masih terkendala oleh belum lengkapnya inventarisasi dan penetapan status aset. Beliau menegaskan:

“Aset yang bisa menghasilkan PAD itu ada, tetapi butuh proses. Harus ada penilaian, kelengkapan dokumen, dan perencanaan pemanfaatan.”

Kondisi ini menjelaskan mengapa kontribusi aset terhadap PAD masih rendah, meskipun Kabupaten Toraja Utara memiliki cukup banyak aset potensial.

Pembahasan/Diskusi

Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini menjelaskan faktor-faktor utama yang menyebabkan rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Toraja Utara. Temuan mengenai basis pajak yang sempit mendukung teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi kondisi ekonomi lokal. Keterbatasan pendataan dan pengawasan wajib pajak menunjukkan adanya kelemahan kelembagaan sebagaimana dijelaskan dalam teori governance, yaitu bahwa efektivitas administrasi publik menentukan kinerja keuangan.

Temuan tentang pemanfaatan aset daerah memperkuat teori Resource-Based View (RBV) bahwa aset daerah merupakan sumber daya strategis yang dapat memberikan keuntungan fiskal jika dikelola secara tepat. Namun, keterbatasan regulasi dan perencanaan membuat aset tersebut belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pemungutan pajak belum memberikan dampak signifikan, karena kesiapan teknologi dan literasi digital masyarakat masih rendah. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi membutuhkan dukungan kelembagaan dan infrastruktur agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola, penguatan administrasi pendataan pajak, pemanfaatan aset yang lebih terencana, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan fiskal daerah.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Toraja Utara masih berada pada tingkat yang rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang kebutuhan belanja daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat dominan, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan inovasi kebijakan fiskal menjadi terbatas. Temuan ini menjawab tujuan penelitian untuk menilai kondisi faktual kemandirian fiskal sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya PAD disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu basis pajak yang sempit akibat dominasi usaha berskala mikro, kelemahan kelembagaan dalam pendataan dan pengawasan wajib pajak, serta pemanfaatan aset daerah yang belum optimal karena keterbatasan legalitas dan perencanaan pemanfaatan. Temuan ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal dan teori kelembagaan yang menekankan pentingnya kekuatan institusi dan tata kelola dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Digitalisasi pemungutan pajak melalui penerapan metode pembayaran elektronik dinilai memberikan arah positif bagi perbaikan tata kelola pemungutan pajak; namun efektivitasnya masih terbatas. Hambatan seperti kesiapan teknologi, keterbatasan SDM, dan rendahnya literasi digital wajib pajak membuat digitalisasi belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, strategi digitalisasi perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas tenaga teknis dan perluasan infrastruktur pendukung agar dapat memberikan dampak jangka panjang. Jika dikaitkan dengan kerangka teoritis dan hipotesis konseptual penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kelembagaan, basis ekonomi, pemanfaatan aset, dan digitalisasi memiliki hubungan yang selaras dengan kemandirian fiskal daerah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa arah hubungan yang dirumuskan dalam model penelitian dapat diterima secara kualitatif karena seluruh hasil wawancara konsisten dengan teori dan

penelitian terdahulu. Penelitian ini secara teoretis memperkaya pemahaman tentang bagaimana penguatan institusi dan pemanfaatan sumber daya lokal berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang hanya terdiri dari dua pejabat pemerintah daerah, sehingga cakupan perspektif empiris yang diperoleh masih terbatas. Selain itu, penelitian belum melibatkan pelaku usaha atau wajib pajak sebagai informan tambahan yang dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai kepatuhan dan persepsi terhadap kebijakan PAD. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat dan sektor usaha, serta mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif atau komparatif untuk memberikan validasi empiris yang lebih kuat terhadap hubungan antara digitalisasi, tata kelola, pemanfaatan aset, dan kemandirian fiskal.

Referensi

1. Aminah, S., & Kusuma, H. (2021). Struktur ekonomi daerah dan pengaruhnya terhadap kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 95–108. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i2.14821>
2. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
3. Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
4. Creswell, J. W., & Poth, C. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
5. Darma, R., & Aimon, H. (2021). Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(1), 14–27. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i1.3412>
6. Digdowiseiso, K. (2023). Fiscal dependence and regional inequality in Indonesia: A post-decentralization review. *Journal of Asian Public Policy*, 16(2), 240–257. <https://doi.org/10.1080/17516234.2022.2059181>
7. Febrianti, A., & Dharma, N. (2024). Kapasitas kelembagaan dan kinerja keuangan daerah: Studi pada pemerintah kabupaten di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 22–38. <https://doi.org/10.24843/jakp.2024.v14.i01.p03>
8. Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965. <https://doi.org/10.1111/jan.13031>
9. Kuncoro, A., & Sari, M. (2020). Tourism-based local economy and its impact on regional fiscal capacity. *Regional Studies in Indonesia*, 5(1), 33–48.
10. Lewis, B. (2020). Local government revenue in Indonesia: Political and economic determinants. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 329–351. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846033>
11. Mardiasmo. (2019). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Andi.
12. Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
13. Oates, W. (2019). An essay on fiscal federalism revisited. *National Tax Journal*, 72(2), 231–254. <https://doi.org/10.1086/703177>
14. Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis. *Administration and Policy in Mental Health*, 42, 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
15. Prabowo, H., & Cooper, K. (2021). Accountability, governance and performance of local governments in Indonesia. *Asian Journal of Public Administration*, 43(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/02598272.2020.1731543>
16. Pratama, A., & Indrawati, D. (2022). Fiscal dependency in newly autonomous regions in Indonesia. *Journal of Public Sector Accounting*, 8(2), 122–135.
17. Rahman, A., & Setyawan, B. (2023). Determinants of local government financial independence: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 1–15. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.3567>
18. Rahmawati, S., & Setiawan, H. (2022). Good governance and local fiscal capacity: An empirical study from Eastern Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 101–118.
19. Santoso, R., & Maharani, N. (2023). Resource-based view in public sector: Strategic asset management and regional revenue improvement. *Jurnal Manajemen Strategis*, 12(3), 211–226.
20. Setyawan, M., & Siregar, A. (2024). Digital transformation of local tax administration: Opportunities and challenges. *Journal of Digital Governance*, 3(1), 55–70. <https://doi.org/10.5678/jdg.v3i1.121>
21. Utami, L., & Nugroho, A. (2022). The effect of digital payment systems on taxpayer compliance: Evidence from local tax administration in Indonesia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(3), 106–124.